



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir Nomor 2 ☎ (0532) 21126 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah

RENCANA KERJA
RENJA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2020

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk memberi arah yang lebih konkrit dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan demi menjamin konsistensi, komitmen dan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Semoga dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 dapat memberikan manfaat dan dijadikan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, Juli 2019
Sekretaris Daerah
Kab. Kotawaringin Barat,



SUYANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 199203 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Sesuai dengan amanat pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan. Hal ini mengamanatkan bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjalankan tugas sebagai unsur staf pendukung Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya. Sesuai amanat pasal 213 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 peran Sekretariat Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, hal ini menuntut

kinerja Sekretariat Daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

14. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan

Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
26. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Berita Daerah Nomor 19 Tahun 2019).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini adalah untuk memberikan arah bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 1 (satu) tahun ke depan dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun ke depan
2. Memberikan instrumen pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020
3. Memberikan instrumen pengendalian dan evaluasi Renja Sekretariat Daerah tahun 2020

4. Untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan dan penganggaran tahun 2020

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika/ susunan penyajian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Tahun 2019. Selanjutnya dikaitkan dengan target capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, yang kemudian akan disajikan dalam tabel T-C.29.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi. Pada pembahasan sub bab ini akan disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah sebagaimana tabel T-C.30.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.

2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat kajian (*review*) program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan rancangan awal RKPD yang disajikan dalam tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan disajikan dalam tabel T.C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Sekretariat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan rumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020, yang disajikan dalam tabel T-C.33

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRASEKRETARIAT DAERAH

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

Pada tahun 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh pagu dana Belanja Langsung pada APBD (murni) sebesar Rp.37.643.524.000,- dan APBD Perubahan sebesar Rp.41.217.524.000,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 29 (dua puluh sembilan) Program dan 83 (delapan puluh tiga) Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.36.979.991.324,- dan capaian kinerja fisik sebesar 96,02% serta capaian kinerja keuangan sebesar 89,72%. Sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Tahun 2019 yang dikaitkan dengan target capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya disajikan dalam tabel T-C.29.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah periode 2017-2022) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu/ Th. 2018 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1/ tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan (2018)	
					Target renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Persentase SKPD yang nilai SAKIPnya baik (B) hasil evaluasi Inspektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi	75 %		60 %	60 %	100%	67 %	126,7 %	169%
	Keg. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LKIP RKT, PK, ANJAB & ABK Kabupaten Kotawaringin Barat yang tersusun	3 Dokumen	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	3 dok	9 dok	300%

		Jumlah dokumen ANJAB & ABK Kabupaten Kotawaringin Barat yang tersusun	1 Dokumen		1 Dok	1 dok	100%	1 dok	2 Dokumen	200%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	98 %		97 %	98,91 %	102%	97 %	195,91 %	200%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat/	500 pucuk surat.	203 pucuk surat.	840 pucuk surat.	150 pucuk surat.	18%	500 pucuk surat.	#VALUE! pucuk surat.	#VALUE!
		jumlah paket	50 kg paket	35 kg paket	75 kg paket	120 kg paket	160%	50 kg paket	kg paket	
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 bulan	12	12 bulan	12 bulam	100%	12 bulan	36 bulan	300%
	Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	12 bulan	12 bulan	1 tahun	100%	1 tahun	14 tahun	1400%
	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	27 orang	10 orang	27 orang	5 orang	19%	27 orang	42 orang	156%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah	Jumlah gedung/ barang milik daerah yang diasuransikan	4 gedung	4 gedung	4 gedung	4 gedung	100%	4 gedung	12 gedung	300%

	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	96 unit	63 unit	101 unit	54 unit	53%	96 unit	213 unit	222%
	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulsn	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	160 unit/tahun	188	135 unit/tahun	137 unit/tahun	101%	159 unit/tahun	484 unit/tahun	303%
	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan	45 jenis ATK	49	45 jenis ATK	41 jenis ATK	91%	45 jenis ATK	135 jenis ATK	300%
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah persediaan barang cetakan	20 jenis	17	15 jenis	19 jenis	127%	20 jenis	56 jenis	280%
		Jumlah Penggandaan	326000 lembar	300000	250000 lembar	260000 lembar	104%	326000 lembar	886000 lembar	272%
	Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/penerangan bangunan	Jumlah Komponen dan instalasi listrik yang disediakan	32 jenis/komponen	30	35 jenis/komponen	35 jenis/komponen	100%	32 jenis/komponen	97 jenis/komponen	303%

	kantor									
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	48 jenis	10	48 jenis	26 jenis	54%	48 jenis	84 jenis	175%
	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	2	1 paket	6 jenis		1 paket	9 paket	900%
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan minuman, rapat, dan tamu kerja yang disediakan	12 bulan	12	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
	Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	345 ok		1 tahun	347 tahun	34700%
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi KDH/ WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang dilaksanakan oleh KDH dan WKDH	1 tahun	1 tahun	1 tahun	46 OK		1 tahun	48 tahun	4800%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	93 %		90 %	98,91 %	110%	90 \$	188,91 %	203%
	Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dibangun			1 unit	1 unit	100%	1 unit	2	#DIV/0!

	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit	50%	1 unit	4 unit	400%
	Kegiatan Pengadaan Mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan		1 unit	2 unit	2 unit	100%		3	#DIV/0!
	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit		0	0	#DIV/0!	1 unit	1 unit	100%
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan rumah gedung/kantor yang diadakan	10 jenis	13 jenis	10 jenis	15 jenis	150%	10 jenis	38 jenis	380%
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan			0	0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
	Kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	10 jenis		8 jenis	8 jenis	100%	10 jenis	18 jenis	180%
	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	2 jenis				#DIV/0!	2 jenis	2 jenis	100%
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Asrama	Jumlah perlengkapan gedung asrama yang diadakan	2 jenis		2 jenis	1 jenis	50%	2 jenis	3 jenis	150%
	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan	2 jenis		2 jenis	4 jenis	200%	2 jenis	6 jenis	300%

	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	6 unit	300%
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 unit	3 unit	4 unit	1 unit	25%	4 unit	8 unit	200%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	4 unit	3 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	11 unit	275%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara rutin/berkala	89 unit	69 unit	89 unit		0%	89 unit	158 unit	178%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	50 unit	100 unit	50 unit		0%	50 unit	150 unit	300%
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	1 unit				#DIV/0!	1 unit	1 unit	100%
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	50 unit	6 unit			#DIV/0!	50 unit	56 unit	112%
	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab	2 unit	1 unit	2 unit	1 rujab	50%	2 unit	4 unit	200%
	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	4 unit	6 unit	4 unit	4 gedung	100%	4 unit	14 unit	350%

	Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab	1 unit	2 unit	1 unit		0%	1 unit	3 unit	300%
	Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung asrama	Jumlah asrama mahasiswa yang direhab			2 unit	2 asrama	100%		2	#DIV/0!
	Kegiatan penyediaan jasa sewa asrama mahasiswa	Jumlah Asrama/ mess mahasiswa yang di sewa	7 asrama		7 asrama	2 asrama	29%	7 asrama	9 asrama	129%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %		0%	100 %	200 %	200%
	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	300%
	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	300%
							#DIV/0!		0	#DIV/0!
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	92 %	0 %	90 %	97 %	107%	90 %	186,67 %	203%

	Kegiatan Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Jumlah mesin/ kartu absensi yang diadakan	2 unit		4 unit	5 unit	125%		5 unit	250%
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	219 stell	177 stell	219 unit	16 stell	7%	219 stell	412 stell	188%
	Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	227 stell	183 stell	227 stell	408 stell	180%	27 stell	618 stell	272%
	Prog. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	26 %		26 %		0%	21 %	21 %	81%
	Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek dan pelatihan	42 OK		38 OK	42 OK	111%	42 OK	84 OK	200%
	Program Fasilitasi pindah/ purna tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/ purna tugas	76 %				#DIV/0!	92 %	92 %	121%
	Pemulangan Pegawai pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan					#DIV/0!		0	#DIV/0!

	Program Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan	Jumlah sistem informasi bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang yang diterapkan dalam mendukung E-gov	2 sistem informasi		2 sistem informasi	2 sistem informasi	100%	2 sistem informasi	2 sistem informasi	100%
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	- Jumlah data perusahaan yang diverifikasi/ mendapatkan fasilitasi agregasi & laporan pengaduan permasalahan LPSE serta data SKPD/ PPK/ Panitia/ Pejabat Pengadaan yang memperoleh akun dalam SPSE	36 data		36 data	36 data	100%	36 data	72 data	200%
		- Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek LPSE	100 orang		100 orang	100 orang	100%	100 orang	200 orang	200%
		- Jumlah peserta asistensi SiRUP	38 SKPD		38 SKPD	38 SKPD	100%	38 SKPD	76 SKPD	200%
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD yang dihasilkan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	300%
		Jumlah SKPD yang mengikuti asistensi penyusunan	38 SKPD		38 SKPD	38 SKPD	100%	38 SKPD	76 SKPD	200%

		LPPD								
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Jumlah rancangan dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran Setda yang dihasilkan	90 %		90 %		0%	90 %	90 %	100%
	Kegiatan Peningkatan Manajemen bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah peserta bimtek/ sosialisasi dalam rangka peningkatan kompetensi Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100 orang		100 orang	100 orang	100%	100 orang	200 orang	200%
		Jumlah laporan SDDKN	2 dok		2 dok	2 dok	100%	2 dok	4 dok	200%
	Keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan dan dokumentasi Monev Program/ kegiatan pembangunan	2 dok		2 dok	2 dok	100%	2 dok	4 dok	200%
		Jumlah laporan monev online & monev SiRUP	24 dok		24 dok	24 dok	100%	24 dok	48 dok	200%
		Website bag. Adm. Pembangunan yang dikelola	1 web		1 web	1 web	100%	1 web	2 web	200%

		Jumlah laporan monev pemberian hibah dan bansos	12 eks		12 eks	12 eks	100%	12 eks	24 eks	200%
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	Persentase produk hukum yang dapat diakses masyarakat	100 %		100 %	84 %	84%	100 %	184,3 %	184%
	Kegiatan Kajian Peraturan Per-UU Daerah terhadap Per-UU yang Baru, lebih tinggi dan keserasian antara per-UU Daerah	Jumlah Perda ditetapkan	10 perda	11 perda	10 perda	31 perda	310%	10 perda	52 perda	520%
		jumlah peraturan Bupati dan keputusan Bupati ditetapkan	60 perbup/SK	256 perbup/SK	60 perbup/SK	279 perbup/SK	465%	60 perbup/SK	595 perbup/SK	992%
	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Lembaran Daerah dan Berita Daerah diterbitkan	60 dok	45 Dok	60 dok	86 dok	143%	60 dok	191 dok	318%
		Jumlah Himpunan Perda yang disebarluaskan	140 buku	50 buku	120 buku	50 buku	42%	120 buku	220 buku	157%

		Jumlah Produk Hukum yang dapat diakses masyarakat	210 dok	470 dok	210 dok	308 dok	147%	210 dok	988 dok	470%
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Desa/kelurahan tersosialisasi	10 desa	5 desa	10 desa	6 desa	60%	10 desa	21 desa	210%
		Jumlah Kelompok Kadarkum dan Desa Binaan Sadar Hukum	10 kelompok dan desa		10 kelompok dan desa	1 kelompok	10%	10 kelompok dan desa	11 kelompok dan desa	110%
	Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum	Jumlah Rapat-Rapat Permasalahan Hukum oleh Tim Khusus	12 kali	12 kali	12 kali	5 permasalahan hukum	42%	12 kali	29 kali	242%
		Jumlah Dokumen Administrasi Beracara di Pengadilan	2 dok	5 dok	2 dok		0%	2 dok	7 dok	350%
		Jumlah Jasa Advokasi/Pengacara	1 paket		1 paket		0%	1 paket	1 paket	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi/Sosialisasi Hak Asasi Manusia	2 kali	1 kali	2 kali	-	#VALUE!	2 kali	#VALUE! kali	#VALUE!
		Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Panitia RANHAM dan Pokja	6 kali		6 kali		0%	6 kali	6 kali	100%

	Program penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi publik	Persentase publikasi dan dokumentasi pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah	85 %		80 %		0%	80 %	80 %	94%
	Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumentasi Naskah Sambutan/ Pidato Bupati	200 buku	200 buku	200 buku	200 buku	100%	200 buku	600 buku	300%
		Jumlah dokumentasi data dan informasi dari media dalam bentuk kliping	356 eks	365 eks	356 eks	365 eks	103%	356 eks	1086 eks	305%
	Kegiatan Peliputan dan publikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Peliputan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan dan luar daerah	72 kali	72 kali	13 kali	240 kali	1846%	72 kali	384 kali	533%
	Kegiatan Dialog/ Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	1 tahun	1 tahun	1 tahun		0%	1 tahun	2 tahun	200%
		Jumlah kegiatan rapat Forkopimda yang diselenggarakan	15 kali		15 kali		0%	15 kali	15 kali	100%

	Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri yang diterima	30 kali		30 kali	30 kali	100%	30 kali	60 kali	200%
	Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	80 kali		80 kali	80 kali	100%	80 kali	160 kali	200%
	Kegiatan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah jasa keprotokolan	10 kali		20 kali	20 kali	100%	10 kali	30 kali	300%
	Program Pembinaan dan pengembangan organisasi	Persentase SKPD yang memiliki SOP bidang administrasi dan pemerintahan	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200%
	Keg. Penyusunan, Penataan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah peserta sosialisasi SOP dan Pelayanan Publik	100 orang		100 orang	100 orang	100%	100 orang	200 orang	200%

		Jumlah laporan hasil survey IKM SKPD	6 SKPD		5 SKPD	5 SKPD	100%	6 SKPD	11 SKPD	183%
	Kegiatan Peningkatan dan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah profil kelembagaan yang dihasilkan	1 dok		1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	200%
		Jumlah dokumen SPM yang dibuat	3 dok		3 dok	3 dok	100%	3 dok	6 dok	200%
		Jumlah Perda dan Perbup tentang Tupoksi dan Organisasi Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 perda/perbup		10 perda/perbup		0%	10 perda/perbup	10 perda/perbup	100%
	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Jumlah Desa yang memiliki dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	16 desa		16 desa	15 desa	94%	16 desa	31 desa	194%
	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	180 orang		180 orang	162 orang	90%	180 orang	342 orang	190%

		Jumlah Desa yang dimonev bidang penyelenggara n pemdes	16 desa	7 desa	16 desa	15 desa	94%	16 desa	38 desa	238%
	Pemilihan Kepala Desa	Jumlah SK Bupati tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa					#DIV/0!	46 SK	46	#DIV/0!
		Waktu pemberian stimulan kepada Demang Kepala Adat (2 orang)	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	200%
	Monitoring dan Pelaporan Pemilu	Jumlah Laporan Penyelenggara n Pemilu yang dihasilkan	3 Dok				#DIV/0!	3 Dok	3 Dok	100%
	Penyiapan data dan informasi pembentukan, penataan dan pengembangan wilayah	Jumlah data kesiapan pemekaran kecamatan	1 Dok		3 dok	1 dok	33%	1 Dok	2 Dok	200%
		Jumlah Ranperda pemekaran kecamatan	1 Dok		3 dok	0	0%	1 Dok	1 Dok	100%
	Penyelesaian Masalah Perbatasan antar daerah	Jumlah Perbup tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5 Perbup	9 BA	10 BA	4 BA	40%	5 Perbup	18 Perbup	360%
	Kerjasama antar Daerah/ Pihak Ketiga	Jumlah Pengajuan/ Penawaran Kerjasama dengan Daerah Lain/ Pihak Ketiga	5 Dok		5 Dok	4 dok	80%	5 Dok	9 Dok	180%

							#DIV/0!		0	#DIV/0!
	Prog. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan	45 %		1 SK		0%	40 %	40 %	89%
	Penyiapan Data dan Identifikasi Awal Lahan gambut	Jumlah laporan hasil survey dan peta serta SK pelepasan areal lahan gambut	1 Dok		1 Dok		0%	1 Dok	1 Dok	100%
	Penyelesaian konflik pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang dapat terselesaikan	5 permasalahan				#DIV/0!	3 permasalahan	3 permasalahan	60%
	Program Pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Persentase laporan monev bid perekonomian yang dihasilkan	100 %			16 %	#DIV/0!		16,26 %	16%
	Pemantauan dan Evaluasi bidang pengembangan ekonomi dan potensi daerah	jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan ekonomi dan potensi daerah yang dilaksanakan	2 Dok		2 dok	2 dok	100%	2 Dok	4 Dok	200%
	Pengendalian dan pemantauan sarana perekonomian	Jumlah laporan pengawasan, penyaluran BBM dan LPG di 6 Kecamatan	6 Dok	6 dok	6 Dok	6 laporan	100%	6 Dok	18 Dok	300%

	Program peningkatan infrastruktur, pengendalian energi dan Sumber Daya Alam	Persentase laporan pengendalian bidang infrastruktur ketenagalistrikan dan Sumber Daya Alam yang dihasilkan	100 %				#DIV/0!		0 %	0%
	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Tenaga Listrik	Jumlah pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU di 6 kecamatan Kab. Kobar	9 Paket	5 paket	9 Paket	10 paket	111%	7 Paket	22 Paket	244%
	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Sumber Daya Alam	Jumlah dan jenis potensi sumber daya alam yang di monev	2 jenis		6 laporan	6 laporan	100%	2 jenis	8 jenis	400%
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan	Persentase pelayanan dan fasilitasi di bidang keagamaan dan kemasyarakatan	90 %				#DIV/0!	90 %	90 %	100%
	Kegiatan Pelayanan, pembinaan dan peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan	Jumlah calon/ jemaah haji yang dapat terlayani	156 orang	148 orang	160 orang	138 orang	86%	156 orang	442 orang	283%
		Jumlah penghulu Non PNS yang diberikan insentif	38 orang		38 orang	25 orang	66%	38 orang	63 orang	166%

		Jumlah laporan Rumah Ibadah yang dimonitoring dan dievaluasi	1 Dok		1 Dok		0%	1 Dok	1 Dok	100%
		Jumlah Guru Ngaji yang diberikan insentif	170 orang		170 orang	274 orang	161%	170 orang	444 orang	261%
		Jumlah dialog antar tokoh agama	1 kali		1 kali		0%	1 kali	1 kali	100%
		Jumlah desa di Kecamatan yang dikunjungi dalam kegiatan safari ramadhan	6 desa		6 desa	6 desa	100%	6 desa	12 desa	200%
		Jumlah rumah ibadah dan rukun kematian yang akan mendapatkan bantuan peralatan dan perlengkapan ibadah	6 rumah ibadah dan RK		6 rumah ibadah dan RK		0%	6 rumah ibadah dan RK	6 rumah ibadah dan RK	100%
		Jumlah Pemuda yang mengikuti sosialisasi keagamaan	200 orang		200 orang		0%	200 orang	200 orang	100%
		Jumlah ASN yang mengikuti pengajian	500 orang		500 orang	500 orang	100%	500 orang	1000 orang	200%
		Jumlah peringatan hari-hari besar keagamaan yang diselenggarakan	3 kali			2 kali	#DIV/0!	3 kali	5 kali	167%

	Kegiatan Penyusunan bahan Kebijakan dan peningkatan kesadaran	Jumlah Laporan bahan kebijakan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial	1 dok		1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	200%
	Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	3 dok		1 dok	1 dok	100%	3 dok	4 dok	133%
		Jumlah penilaian Lomba Sekolah Sehat	24 sekolah		24 sekolah	24 sekolah	100%	24 sekolah	48 sekolah	200%
	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kemasyarakatan	Jumlah laporan monev lembaga kemasyarakatan	1 dok		1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	200%
		Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan/ hibah	1 dok		1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	200%
	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	100 %				#DIV/0!	100 %	100 %	100%
	Keg. Peningkatan kapasitas layanan pengadaan	Jumlah peserta Bimtek pengadaan barang dan jasa	150 orang		150 orang	150 orang	100%	150 orang	300 orang	200%

	barang/jasa									
		Jumlah peserta Bimtek pengadaan barang dan jasa desa	200 orang		200 orang	20 orang	10%	200 orang	220 orang	110%
		Tingkat kematangan organisasi pengadaan	3 level		3 level	1 level	33%	3 level	4 level	133%
	Keg. Penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa	Jumlah penyelesaian kasus/permasalahan pengadaan barang/jasa (pengaduan, sanggahan dan konsultasi)	20 kasus		20 kasus	5 kasus	25%	20 kasus	25 kasus	125%
	Keg. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Monitoring evaluasi PBJ Desa di Kecamatan dan Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kab. Kobar	6 kec		6 kec	6 kec	100%	6 kec	12 kec	200%

Tabel T-C.29 berisi mengenai hasil evaluasi Renja dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun lalu. Tabel T-C.29 menjelaskan mengenai review pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1). Perkiraan capaian tersebut nantinya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Dari tabel T-C.29 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 8 urusan yang terbagi menjadi 17 program dan 83 kegiatan, dapat diketahui berapa angka capaian realisasi program dan kegiatan pada tahun 2018. Dari Tabel T-C.29 Padatahun 2018 dapat diketahui bahwa dari 83 kegiatan, terdapat 42 kegiatan yang capaian kinerjanya sesuai target perencanaan pada Renja Tahun 2018, 14 kegiatan yang capaian kinerja Renjanya lebih dari 100 %, sedangkan sisanya sebanyak 27 kegiatan, capaian kinerjanya dibawah target Renja Tahun 2018.

Beberapa factor penyebab tidak tercapai/ terpenuhi target yang ditetapkan, diantaranya terdapat perubahan indikator program dan kegiatan di Tahun 2018 yang mengalami penyesuaian dengan target Renstra di tahun tersebut serta berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; yang kedua adalah dikarenakan kurangnya komitmen bersama antara unsur-unsur di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan di awal tahun. Sedangkan untuk kegiatan yang realisasinya diatas 100%, terjadi karena beberapa kondisi di luar perencanaan yang harus diakomodir dengan menambah target kinerja untuk memenuhi kebutuhan pada tahun 2018.

Implikasi yang timbul akibat tidak terpenuhinya target pada Renja terhadap Renstra Sekretariat Daerah adalah, inkonsistensi antara target yang telah direncanakan selama 5

tahun dengan capaian dalam realisasi untuk perencanaan jangka pendek. Dari penjelasan uraian review/ evaluasi realisasi Renja, penyebab tidak tercapainya target yang diharapkan dan implikasinya terhadap Renstra, maka kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi tidak tercapainya target adalah perlu adanya komitmen yang kuat, serta monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan target capaian kinerja program dan kegiatan Sekretariat Daerah.

- **Perkiraan Pencapaian Tahun 2019**

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 dengan pagu dana Belanja Langsung sebesar Rp.41.049.588.000,- terurai dalam 16 (enam belas) program dan 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan diestimasikan capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan keuangan 98 % dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dengan indikator kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n- 2)	Tahun 2019 (thn n- 1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021(thn n+1)	Tahun 2018 (thn n- 2)	Tahun 2019 (thn n- 1) s/d. bl. Mei 2019	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP Kabupaten	-	-	B	A	A	A	CC	-	A	A	Menunggu hasil evaluasi Kemen PAN & RB
2	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	-	-	97	97	98	99	98,33	38,78	98	99	
3	Persentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	-	-	90	90	93	94	98,91	17,41	93	94	
4	Capaian Standar Pelayanan pengelolaan LPSE	-	-	71	82	90	100	71	-	90	100	

5	Capaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
6	Tingkat kepuasan publik terhadap layanan dokumentasi dan informasi hukum	-	-	C	B	B	B	C	-	B	B	
7	Persentase tersebarnya informasi kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat	-	-	80	80	85	90	100	-	85	90	
8	Rata-rata Angka/ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD	-	-	65	70	75	77	82,74	-	83	85	
9	Persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa dengan baik	-	-	70	80	85	90	71,88	-	100	100	

10	Persentase hasil monev bid perekonomian & SDA yang ditindaklanjuti	-	-	76.2	76.2	80.95	80.95	80	-	80.95	80.95	
11	Persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan	-	-	40	90	90	90	80	-	90	90	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai fasilitator dan koordinator dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah serta membantu mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat disimpulkan beberapa isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang diterima tahun 2018 yang masih mendapatkan nilai CC;
2. Belum optimalnya peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat;
3. Belum optimalnya tata laksana perangkat daerah;
4. Belum efektifnya tatakelola pemerintahan desa;
5. Masih lemahnya peran pemerintah dalam penguatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama;
6. Belum optimalnya pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang memenuhi standar pelayanan publik;
7. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
8. Tingkat kematangan organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) masih rendah;
9. Belum optimalnya tindak lanjut atas hasil pengendalian bidang perekonomian dan sumber daya alam;
10. Sarana prasarana dan tata ruang kerja yang kurang representatif;
11. Belum meratanya kesempatan pendidikan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui jika terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan usulan Renja Perangkat Daerah baik dari Program dan Kegiatan maupun besaran pagu dananya. *Review* ini disajikan dalam tabel *review* terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

Review Terhadap Rencana awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nama Perangkat Daerah :
 Sekretariat Daerah

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	98%	14.675.575.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	98%	13.768.304.200	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Sekretariat Daerah	Jumlah surat/paket yang tersampaikan	140Pucuk, 150 kg paket	6.500.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Sekretariat Daerah	Jumlah surat/paket yang tersampaikan	147 Pucuk Surat / 150 Kg Paket	6.046.500	
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Setda, ex Rujab Bupati, Rujab Wabup, Rujab Sekda, Rumah dinas dan PJU	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 bulan	5.750.000.000	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Setda, ex Rujab Bupati, Rujab Wabup, Rujab Sekda, Rumah dinas dan PJU	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 Bulan	5.399.937.200	

Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	355.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	404.750.000	
Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/ Anggota DPR	Sekretariat Daerah	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	12 OK	202.500.000	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/ Anggota DPR	Sekretariat Daerah	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	6 OK	128.000.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah gedung/ barang milik daerah yang diasuransikan	5 gedung dan 5 unit kendaraan	35.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah gedung dan kendaraan dinas / barang milik daerah yang diasuransikan	11 Unit Gedung dan Kendaraan	86.520.000	
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Sekretariat Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	90 unit	61.575.000	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Sekretariat Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	70 Unit	54.650.000	

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat Daerah	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	2.800.000.000	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretari at Daerah	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	2.666.893.500	
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat Daerah	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	970.000.000	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretari at Daerah	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	891.402.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sekretariat Daerah	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	160 unit/ tahun	135.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sekretari at Daerah	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	117 unit / tahun	115.050.000	
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan	40 jenis	175.000.000	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Sekretari at Daerah	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan	53 Jenis	185.000.000	
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat Daerah	Jumlah persediaan barang cetakan	20 jenis	175.000.000	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretari at Daerah	Jumlah persediaan barang cetakan	13 Jenis	150.005.000	
	Sekretariat Daerah	Jumlah Penggandaan	326.000 lembar			Sekretari at Daerah	Jumlah Penggandaan	250.116 Lembar		

Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Komponen dan instalasi listrik yang disediakan	35 jenis/ komponen	175.000.000	Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Sekretari at Daerah	Jumlah Komponen dan instalasi listrik yang disediakan	39 Jenis / komponen	73.010.000	
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	15 jenis	450.000.000	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretari at Daerah	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	15 Jenis	459.250.000	
Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Sekretariat Daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2 jenis	35.000.000	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Sekretari at Daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	7 Jenis	35.000.000	
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat Daerah	Jumlah Makanan dan minuman, rapat, dan tamu kerja yang disediakan	12 bulan	1.300.000.000	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Sekretari at Daerah	Jumlah Makanan dan minuman, rapat, dan tamu kerja yang disediakan	12 Bulan	1.329.840.000	
Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	315 OK	1.250.000.000	Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretari at Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	288 OK	1.107.950.000	

	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi KDH/WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Lainnya	Sekretariat Daerah	Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang dilaksanakan oleh KDH dan WKDH	55 OK	800.000.000	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi KDH/WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Lainnya	Sekretariat Daerah	Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang dilaksanakan oleh KDH dan WKDH	45 OK	675.000.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	93%	23.655.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	93%	12.025.849.800	
	Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan	Jl. P. Antasari Kec. Arsel	Jumlah rumah jabatan yang dibangun	1 Unit	8.000.000.000	Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan	Jl. P. Antasari Kec. Arsel	Jumlah rumah jabatan yang dibangun	1 Unit	3.657.530.000	
	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	5.000.000.000	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 Unit	4.860.025.000	

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2 Unit	1.225.000.000	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	3 Unit	111.000.000	
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas	Sekretariat Daerah	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	15 Jenis	2.000.000.000	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas	Sekretariat Daerah	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	-	-	
Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang diadakan	10 Jenis	550.000.000	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang diadakan	9 Jenis	148.550.800	
Kegiatan Pengadaan Peralatan rumah jabatan/dinas	Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	-	-	Kegiatan Pengadaan Peralatan rumah jabatan/dinas	Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	-	-	
Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Sekretariat Daerah	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	4 Jenis	250.000.000	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Sekretariat Daerah	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis	136.250.000	
Kegiatan Pengadaan Meubelair	Sekretariat Daerah	Jumlah meubelair yang diadakan	15 Jenis	2.500.000.000	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Sekretariat Daerah	Jumlah meubelair yang diadakan	10 Jenis	312.600.000	

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Sekretariat Daerah	Jumlah rumah jabatan/dinas yang dipelihara	2 Unit	120.000.000	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Asrama	Sekretariat Daerah	Jumlah rumah jabatan/dinas yang dipelihara	2 Unit	113.500.000	
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Sekretariat Daerah	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	-	-	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Sekretariat Daerah	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	-	-	
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 Unit	1.000.000.000	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Sekretariat Daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	315.947.000	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Sekretariat Daerah	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	4 Unit	250.000.000	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	4 Unit	206.400.000	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Sekretariat Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara rutin/berkala	19 Unit	350.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Sekretariat Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara rutin/berkala	50 Unit	500.600.000	

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	50 Unit	100.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Sekretariat Daerah	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	70 Unit	28.000.000	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	95 Unit	115.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	102 Unit	84.500.000	
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Sekretariat Daerah	Jumlah rumah jabatan yang direhab	3 Unit	200.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah rumah jabatan yang direhab	2 Unit	231.000.000	
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah gedung kantor yang direhab	3 Unit	1.500.000.000	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Sekretariat Daerah	Jumlah gedung kantor yang direhab	3 Unit	535.000.000	
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Sekretariat Daerah	Jumlah rumah dinas yang direhab	-	-	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Sekretariat Daerah	Jumlah rumah dinas yang direhab	-	-	

	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Asrama	Palangkaraya	Jumlah perlengkapan gedung asrama yang diadakan	2 Jenis	45.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Asrama Mahasiswa	Palangka raya	Jumlah perlengkapan gedung asrama yang diadakan	3 Jenis	30.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Asrama Mahasiswa	Semarang, Surabaya, Malang, Banjarmasin, Banjar Baru, Yogyakarta, Solo	Jumlah asrama mahasiswa yang disewa	7 Asrama	450.000.000	Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung asrama	Semarang, Surabaya, Malang, Banjarmasin, Banjar Baru, Yogyakarta, Solo	Jumlah asrama mahasiswa yang disewa	7 unit / asrama	405.000.000	
	Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung Asrama	Palangkaraya	Jumlah gedung asrama yang direhab	-	-	Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung Asrama	Palangka raya	Jumlah gedung asrama yang direhab	2 Unit	349.947.000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	92%	360.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	92%	357.500.000	
	Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Sekretariat Daerah	Jumlah mesin/ kartu absensi yang diadakan	2 unit	20.000.000	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sekretariat Daerah	Jumlah mesin/ kartu absensi yang diadakan	-	-	

	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sekretariat Daerah	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	404 stell	265.000.000	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sekretariat Daerah	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	210 Stell	177.500.000	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Sekretariat Daerah	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	28 stell	75.000.000	Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Sekretariat Daerah	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	228 Stell	180.000.000	
4	Program Fasilitas Pindah/Purna tugas PNS		Tingkat fasilitas pindah/ purna tugas	-	-	Program Fasilitas Pindah/Purna tugas PNS		Tingkat fasilitas pindah/ purna tugas	-	-	
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Sekretariat Daerah	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	-	-	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Sekretariat Daerah	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	-	-	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	26%	400.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	26%	319.500.000	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek dan pelatihan	45 OK	400.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretari at Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek dan pelatihan	37 OK	319.500.000	
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	63.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	63.000.000	
	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Sekretariat Daerah	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 dokumen	3.000.000	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Sekretari at Daerah	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 dokumen	3.000.000	
	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Sekretariat Daerah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	60.000.000	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Sekretari at Daerah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	60.000.000	
7	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan		Persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan	45%	200.000.000	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan		Persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan	45%	89.650.000	

	Tanah					Tanah					
	Penyiapan Data dan Identifikasi Awal Lahan Gambut	Sekretariat Daerah	Jumlah laporan hasil survey dan peta serta SK pelepasan areal lahan gambut	1 dokumen	100.000.000	Penyiapan Data dan Identifikasi Awal Lahan Gambut	Sekretariat Daerah	Jumlah laporan hasil survey dan peta serta SK pelepasan areal lahan gambut	-	-	
	Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan	Sekretariat Daerah	Jumlah konflik pertanahan yang dapat terselesaikan	4 permasalahan	100.000.000	Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan	Sekretariat Daerah	Jumlah konflik pertanahan yang dapat terselesaikan	3 Permasalahan	89.650.000	
8	Program Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan		- Jumlah sistem informasi bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang yang diterapkan dalam mendukung E-gov	2 Sistem Informasi	720.000.000	Program Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan		- Jumlah sistem informasi bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang yang diterapkan dalam mendukung E-gov	2 Sistem Informasi	579.000.000	

			- Persentase data dan informasi bidang perencanaan, pengendalian, monev dan administrasi pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	100%				- Persentase data dan informasi bidang perencanaan, pengendalian, monev dan administrasi pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	100%		
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara elektronik	Sekretariat Daerah	- Jumlah data perusahaan yang diverifikasi/ mendapatkan fasilitasi agregasi & laporan pengaduan permasalahan LPSE serta data SKPD/ PPK/ Panitia/ Pejabat Pengadaan yang memperoleh	36 laporan	275.000.000	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara elektronik	Sekretariat Daerah	- Jumlah data perusahaan yang diverifikasi/ mendapatkan fasilitasi agregasi & laporan pengaduan permasalahan LPSE serta data SKPD/ PPK/ Panitia/ Pejabat Pengadaan yang memperoleh	36 Data	191.652.400		

			akun dalam SPSE					akun dalam SPSE			
			- Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek LPSE - Jumlah peserta asistensi SiRUP	100 Orang 38 SKPD				- Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek LPSE - Jumlah peserta asistensi SiRUP	145 Orang 38 SKPD		
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah rancangan dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran Setda yang dihasilkan	25 dokumen	75.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah rancangan dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran Setda yang dihasilkan	25 Dokumen	47.470.400		

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan dan dokumentasi Monev Program/ kegiatan pembangunan Jumlah laporan monev online & monev SiRUP Website bag. Adm. Pembangunan yang dikelola Jumlah laporan TEPRA Kab. Ktw. Barat	6 laporan 24 laporan 1 web 12 dokumen	210.000.000	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan kegiatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan dan dokumentasi Monev Program/ kegiatan pembangunan Jumlah laporan monev online & monev SiRUP Website bag. Adm. Pembangunan yang dikelola Jumlah laporan TEPRA Kab. Ktw. Barat	6 Laporan 12 Dokumen - 12 Dokumen	228.480.000	
kegiatan Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Jumlah peserta bimtek/ sosialisasi dalam rangka peningkatan kompetensi Panitia/ Pejabat Penerima Hasil	100	160.000.000		Sekretariat Daerah	Jumlah peserta bimtek/ sosialisasi dalam rangka peningkatan kompetensi Panitia/ Pejabat Penerima Hasil	100 OK	111.397.200	

			Pekerjaan					Pekerjaan			
			Jumlah laporan SDDKN	2				Jumlah laporan SDDKN	2 Dokumen		
9	Program Peningkatan Infrastruktur , Pengendalian energi dan Sumber Daya Alam		Persentase laporan pengendalian bidang infrastruktur ketenagalistrikan dan Sumber Daya Alam yang dihasilkan		2.365.000.000	Program Peningkatan Infrastruktur, Pengendalian energi dan Sumber Daya Alam		Persentase laporan pengendalian bidang infrastruktur ketenagalistrikan dan Sumber Daya Alam yang dihasilkan	100%	2.699.590.000	
	Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan infrastruktur tenaga listrik	6 kec (Arsel, Kumai, Aruta, P.Lada, P. Banteng, Ktw. Lama)	Jumlah pemeliharaan, pengadaan dan pemasangan lampu PJU serta jaringan listrik di 6 kecamatan Kab. Kobar	9 paket	2.300.000.000	Kegiatan Pembangunan / Peningkatan infrastruktur tenaga listrik	6 kec (Arsel, Kumai, Aruta, P.Lada, P. Banteng, Ktw. Lama)	Jumlah pemeliharaan, pengadaan dan pemasangan lampu PJU serta jaringan listrik di 6 kecamatan Kab. Kobar	447 Unit dan tiang	2.640.000.000	

	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber daya Alam	Kab. Ktw. Barat, Prov. Kalteng, Prov. Lainnya	Jumlah dan jenis potensi sumber daya alam yang di monev	2 jenis	65.000.000	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber daya Alam	Kab. Ktw. Barat, Prov. Kalteng, Prov. Lainnya	Jumlah dan jenis potensi sumber daya alam yang di monev	2 Jenis	59.590.000	
10	Program Penataan Peraturan Perundangan-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi hukum		- Persentase produk hukum yang dapat diakses masyarakat - Persentase permasalahan hukum yang tertangani	100% 100%	1.210.000.000	Program Penataan Peraturan Perundangan-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi hukum		- Persentase produk hukum yang dapat diakses masyarakat - Persentase permasalahan hukum yang tertangani	100% 100%	963.925.000	
	Kegiatan Kajian Peraturan Per-UU Daerah terhadap Per-UU yang Baru, lebih tinggi dan keserasian antara per-UU Daerah	Sekretariat Daerah	- Jumlah Perda ditetapkan - Jumlah peraturan Bupati yang ditetapkan	10 Perda 25 Perbup	300.000.000	Kegiatan Kajian Peraturan Per-UU Daerah terhadap Per-UU yang Baru, lebih tinggi dan keserasian antara per-UU Daerah	Sekretariat Daerah	- Jumlah Perda ditetapkan - Jumlah peraturan Bupati yang ditetapkan	10 Perda 20 Perbup	167.000.000	
	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-	6 kec (Arsel, Kumai, Aruta, P.Lada, P. Banteng,	- Jumlah Lembaran Daerah dan Berita daerah	10 Desa	60.000.000	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-	6 kec (Arsel, Kumai, Aruta,	- Jumlah Lembaran Daerah dan Berita daerah	30 Dokumen	55.000.000	

undangan	Ktw. Lama)	Diterbitkan - Jumlah Himpunan Perda yang disebarluaskan - Jumlah Produk hukum Yang Dapat diakses masyarakat	10 Kelompok dan Desa 12 kali		undangan	P.Lada, P. Banteng, Ktw. Lama)	Diterbitkan - Jumlah Himpunan Perda yang disebarluaskan - Jumlah Produk hukum Yang Dapat diakses masyarakat	50 Buku 30 Dokumen		
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	6 kec (Arsel, Kumai, Aruta, P.Lada, P. Banteng, Ktw. Lama)	- Jumlah Desa/ kelurahan tersosialisasi - Jumlah Kelompok Kadarkum dan Desa Binaan Sadar Hukum	10 Desa 10 Kelompok dan Desa	280.000.000	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	6 kec (Arsel, Kumai, Aruta, P.Lada, P. Banteng, Ktw. Lama)	- Jumlah Desa/ kelurahan tersosialisasi - Jumlah Kelompok Kadarkum dan Desa Binaan Sadar Hukum	6 Desa 2 Desa	210.000.000	
Kegiatan Pemberian bantuan Hukum	Pangkalan Bun	- Jumlah rapat-rapat permasalahan hukum oleh tim khusus	12 kali	500.000.000	Kegiatan Pemberian bantuan Hukum	Pangkalan Bun	- Jumlah rapat-rapat permasalahan hukum oleh tim khusus	12 Kali	480.425.000	

		- Jumlah dokumen administrasi beracara dipengadilan - Jumlah jasa advokasi / pengacara - Jumlah bantuan hukum yang diberikan kepada pemerintah kab.Ktw.Barat	2 dokumen 6 kali / kasus 4 Permasalahan Hukum				- Jumlah dokumen administrasi beracara dipengadilan - Jumlah jasa advokasi / pengacara - Jumlah bantuan hukum yang diberikan kepada pemerintah kab.Ktw.Barat	2 Dokumen 6 kali / Kasus 4 Permasalahan Hukum		
Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Pangkalan Bun	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi/ Sosialisasi Hak Asasi Manusia	2 kali	70.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Pangkalan Bun	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi/ Sosialisasi Hak Asasi Manusia	2 kali	51.500.000	
	12	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Panitia RANHAM dan Pokja	3 kali				Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Panitia RANHAM dan Pokja	3 kali		

1 1	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah				1.370.000.000	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah			100%	834.990.700	
	Kegiatan Peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang/jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah peserta Bimtek pengadaan barang dan jasa	150	1.100.000.000	Kegiatan Peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang/jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang / jasa kabupaten melalui ULP	60 Dokumen	699.990.900	
			Jumlah peserta Bimtek pengadaan barang dan jasa desa	200				Jumlah peserta Bimtek pengadaan barang dan jasa	220 Orang		
			Tingkat kematangan organisasi pengadaan	3				-			

Kegiatan Penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah penyelesaian kasus/permasalahan pengadaan barang/jasa (pengaduan, sanggahan dan konsultasi)	20	170.000.000	Kegiatan Penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa	Sekretariat Daerah	Jumlah penyelesaian kasus/permasalahan pengadaan barang/jasa (pengaduan, sanggahan dan konsultasi)	8 Kasus	70.000.000	
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah	Monitoring evaluasi PBJ Desa di Kecamatan dan Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kab. Kobar	6	100.000.000	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah	Monitoring evaluasi PBJ Desa di Kecamatan dan Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kab. Kobar	6 Kecamatan	64.999.800	
		Jumlah laporan evaluasi pengadaan barang/ jasa Kabupaten Kotawaringin Barat	12				Jumlah laporan evaluasi pengadaan barang/ jasa Kabupaten Kotawaringin Barat	-		

1 2	Program Penyelenggaraan dan Keprotokolan dan Komunikasi Publik		Persentase publikasi dan dokumentasi pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah		2.166.750.000	Program Penyelenggaraan dan Keprotokolan dan Komunikasi Publik		Persentase publikasi dan dokumentasi pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah	85%, dan 90%	1.897.700.000	
	Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Pemerintah daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah dokumentasi Naskah Sambutan/ Pidato Bupati	200 buku	62.000.000	Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Pemerintah daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah dokumentasi Naskah Sambutan/ Pidato Bupati	200 Buku	57.500.000	
			Jumlah dokumentasi data dan informasi dari mediadalam bentuk kliping	356 exp				Jumlah dokumentasi data dan informasi dari mediadalam bentuk kliping	365 Exp		
								Jumlah Kegiatan pengumpulan dan penyaringan informasi hasil audiensi	12 Kegiatan		
	Kegiatan Peliputan dan Publikasi Pemerintah daerah		- Jumlah Peliputan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan	72 kali	404.750.000	Kegiatan Puliputan dan Publikasi Pemerintah daerah		Jumlah Peliputan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan	17 Kali Peliputan	350.000.000	

			dan luar daerah					dan luar daerah			
			- Jumlah kegiatan pameran pembangunan / publikasi pemerintah daerah yang diikuti	1 kali				Jumlah kegiatan pameran pembangunan / publikasi pemerintah daerah yang diikuti	1 kali		
			- Jumlah dokumentasi dan publikasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk buletin, album, DVD, spanduk dan sejenisnya	9 jenis				Jumlah dokumentasi dan publikasi kegiatan bupati dan wakil bupati dalam bentuk buletin, album, DVD, spanduk, dan sejenisnya	9 Jenis Dokumentasi		

Kegiatan Dialog/ Audinsi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat		Jumlah dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	1 tahun	650.000.000	Kegiatan Dialog/ Audinsi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat		Jumlah dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	1 tahun	600.000.000	
Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri		Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri yang diterima	30 kali	500.000.000	Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri		Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri yang diterima	30 kali	491.000.000	
Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah		Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	80 kali	400.000.000	Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah		Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	80 kali	303.500.000	

	Kegiatan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		Jumlah jasa keprotokolan	10 kali	150.000.000	Kegiatan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		Jumlah jasa keprotokolan	10 Kali	95.700.000	
1 3	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi Daerah		Jumlah Desa yang memiliki dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu		733.800.000	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi Daerah		Jumlah Desa yang memiliki dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	16 Desa	563.490.500	
	Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Desa		Jumlah peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	180 orang	138.800.000	Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Desa		Jumlah peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	200 Orang	149.990.000	

		Waktu pemberian stimulan kepada Demang Kepala Adat (2 orang)	12 bulan				Waktu pemberian stimulan kepada Demang Kepala Adat (2 orang)	12 Bulan		
		Jumlah Desa yang dimonev bidang penyelenggaraan pemdes	16 desa				Jumlah Desa yang dimonev bidang penyelenggaraan pemdes	16 Desa / Kelurahan		
Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan desa (LPPD)		Jumlah dokumen LPPD yang dihasilkan	1 dokumen	100.000.000	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan desa (LPPD)		Jumlah dokumen LPPD yang dihasilkan	1 Dokumen	45.500.000	
		Jumlah SKPD yang mengikuti asistensi penyusunan LPPD	38 SKPD				Jumlah SKPD yang mengikuti asistensi penyusunan LPPD	-		
Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Pembentukan Penataan dan Pengembangan Wilayah		Jumlah data kesiapan pemekaran kecamatan	1 dokumen	315.000.000	Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Pembentukan Penataan dan Pengembangan Wilayah		Jumlah data kesiapan pemekaran kecamatan	3 Dokumen	110.000.000	
		Jumlah Ranperda pemekaran kecamatan	1 Ranperda				Jumlah Ranperda pemekaran kecamatan	2 ranperda		

	Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Daerah		Jumlah Perbup tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5 RanPerbup	80.000.000	Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbatasa antar Daerah		Jumlah Perbup tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5 Ranperbup	173.000.000	
	Kegiatan Kerja sama antar Daerah/Pihak Ketiga		Jumlah Pengajuan/ Penawaran Kerjasama dengan Daerah Lain/ Pihak Ketiga	7 Dokumen	100.000.000	Kegiatan Kerja sama antar Daerah/Pihak Ketiga		Jumlah Pengajuan/ Penawaran Kerjasama dengan Daerah Lain/ Pihak Ketiga	5 Dokumen	85.000.500	
14	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakan		Persentase pelayanan dan fasilitasi di bidang keagamaan dan kemasyarakatan		6.265.000.000	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakan		Persentase pelayanan dan fasilitasi di bidang keagamaan dan kemasyarakatan	90%	6.329.653.400	
	Kegiatan Pelayanan, Pembinaan dan Peningkatan Pemahaman Nilai-nilai Keagamaan		Jumlah calon/ jemaah haji yang dapat terlayani	156	6.000.000.000	Kegiatan Pelayanan, Pembinaan dan Peningkatan Pemahaman Nilai-nilai Keagamaan		Jumlah calon/ jemaah haji yang dapat terlayani	160 Orang	6.119.264.000	

		Jumlah penghulu Non PNS yang diberikan insentif	25				Jumlah penghulu Non PNS yang diberikan insentif	24 Orang		
		Jumlah laporan Rumah Ibadah yang dimonitoring dan dievaluasi	1				Jumlah tokoh agama non islam yang diberi insentif	123 Orang		
		Jumlah Guru Ngaji yang diberikan insentif	274				Jumlah Guru Ngaji yang diberikan insentif	350 Orang		
		Jumlah dialog antar tokoh agama	1				Jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan (kobar bershalawat)	1 kegiatan		
		Jumlah desa di Kecamatan yang dikunjungi dalam kegiatan safari ramadhan	6				Jumlah desa di Kecamatan yang dikunjungi dalam kegiatan safari ramadhan	6 Desa		

		Jumlah rumah ibadah dan rukun kematian yang akan mendapatkan bantuan peralatan dan perlengkapan ibadah	6				Jumlah kegiatan LPTQ/ MTQ yang dilaksanakan	3 Kegiatan		
		Jumlah Pemuda yang mengikuti sosialisasi keagamaan	200							
		Jumlah ASN yang mengikuti pengajian	500							
		Jumlah peringatan hari-hari besar keagamaan yang diselenggarakan	3							

		Jumlah kegiatan MTQ Tk. Kabupaten dan keikutsertaan MTQ Tk. Prov serta pembinaan MTQ	3							
Kegiatan Penyusunan Bahan Kebijakan dan Peningkatan Kesadaran Di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan bahan kebijakan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial	1 dokumen	215.000.000	Kegiatan Penyusunan Bahan Kebijakan dan Peningkatan Kesadaran Di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah	Jumlah penilaian Lomba Sekolah Sehat	24 Sekolah	163.134.400	
		Jumlah bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	3 dokumen							
		Jumlah penilaian Lomba Sekolah Sehat	24 sekolah							

	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kemasyarakatan	Sekretariat Daerah	Jumlah laporan monev lembaga kemasyarakatan	1 dokumen	50.000.000	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kemasyarakatan	Sekretariat Daerah	Jumlah laporan monev lembaga kemasyarakatan	1 Dokumen	47.255.000	
			Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan/hibah	1 dokumen				Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan/hibah	1 Dokumen		
15	Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah		Persentase laporan monev bid perekonomian yang dihasilkan		150.000.000	Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah		Persentase laporan monev bid perekonomian yang dihasilkan	100%	120.489.000	
	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pengembangan Ekonomi dan Potensi Daerah	Kab. Ktw. Barat, Prov. Kalteng, dan Prov. Lainnya	jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan ekonomi dan potensi daerah yang	2 dokumen	75.000.000	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pengembangan Ekonomi dan Potensi Daerah	Kab. Ktw. Barat, Prov. Kalteng, dan Prov. Lainnya	jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan ekonomi dan potensi daerah yang	3 Laporan	70.915.000	

			dilaksanakan					dilaksanakan			
	Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Sarana Perekonomian	6 kec (Arsel, Kumai, Aruta, P.Lada, P. Banteng, Ktw. Lama)	Jumlah laporan pengawasan, penyaluran BBM dan LPG di 6 Kecamatan	6 dokumen	75.000.000	Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Sarana Perekonomian	6 kec (Arsel, Kumai, Aruta, P.Lada, P. Banteng, Ktw. Lama)	Jumlah laporan pengawasan, penyaluran BBM dan LPG di 6 Kecamatan	6 Dokumen	49.574.000	
			Jumah laporan pemantauan sarana perekonomian	2 laporan		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Kinerja Pemerintah		Jumah laporan pemantauan sarana perekonomian	2 Laporan		
16	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Kinerja Pemerintah		Persentase SKPD yang nilai SAKIPnya baik (B) hasil evaluasi Inspektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi		300.000.000	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Kinerja Pemerintah		Persentase SKPD yang nilai SAKIPnya baik (B) hasil evaluasi Inspektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi	75%	350.000.000	

	Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen LKIP RKT, PK, ANJAB & ABK Kabupaten Kotawaringin Barat yang tersusun	4 dokumen	300.000.000		Sekretari at Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	1 Nilai	350.000.000	
								Jumlah ASN yang melapor LHKPN	292 orang		
								Jumlah peserta sosialisasi LHKPN	100 Orang		
								Jumlah peserta kegiatan asistensi LKJIP	100 Orang		
17	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi		Persentase SKPD yang memiliki SOP bidang administrasi dan pemerintahan		500.000.000	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi		Persentase SKPD yang memiliki SOP bidang administrasi dan pemerintahan	100%	336.905.000	
	Kegiatan Penyusunan, Penataan Evaluasi Ketatalaksan	Sekretariat Daerah	Jumlah peserta sosialisasi SOP dan Pelayanan Publik	100 orang	150.000.000	Kegiatan Penyusunan, Penataan Evaluasi Ketatalaksana	Sekretari at Daerah	Jumlah peserta sosialisasi SOP dan Pelayanan Publik	100 orang	100.000.000	

	aan Perangkat daerah		Jumlah laporan hasil survey IKM SKPD	6 SKPD		an Perangkat daerah		Jumlah laporan hasil survey IKM SKPD	7 Dokumen / SKPD		
	Kegiatan Peningkatan dan Penataan Kelembangaa n Organisasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	Jumlah profil kelembagaan yang dihasilkan	1 dokumen	350.000.000	Kegiatan Peningkatan dan Penataan Kelembangaan Organisasi Perangkat Daerah	Sekretari at Daerah	Jumlah profil kelembagaan yang dihasilkan	1 Dokumen	236.905.000	
			Jumlah dokumen SPM yang dibuat	3 dokumen				Jumlah dokumen SPM yang dibuat	3 Dokumen		
			Jumlah Perda dan Perbup tetang Tupoksi dan Organisasi Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 Perda/ Perbup				Monev bidang kelembagaan	1 Kegiatan		
				Total	55.134.125.000					41.299.547. 600	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana program dan kegiatan merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan program dan kegiatan utama untuk periode satu tahun kedepan, namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa usulan dan masukan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Berdasarkan serangkaian kegiatan musrenbang yang telah dilaksanakan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menerima usulan yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja (Renja) yang tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Kotawaringin Barat

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Infrastruktur, Pengendalian Energi dan Sumber Daya Alam	Dusun Karang Anyar – Kumpai Batu Bawah	Jumlah Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Arah Dusun Karang Anyar – Kumpai Batu Bawah	6 Titik	Usulan dari Pokok-pokok Pikiran DPRD
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Tenaga Listrik	Jl Tjilik Riwut 2,Jend Sudirman Arah Kumpai Batu	Jumlah Pengadaan Lampu Jalan	4 Titik	Usulan dari Pokok-pokok Pikiran DPRD
		Jl. Pancasila Rt 22 Kel. Madurejo	Jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Umum	6 Titik	Usulan dari Pokok-pokok Pikiran DPRD

		Rt 004 Sungai Melawen	Jumlah Pembangunan / JTR Jaringan Listrik	30 M	Usulan dari Pokok-pokok Pikiran DPRD
		Ds. Ipuh Bangun Jaya Kec. Kotawaringin Lama	Jumlah Pengadaan / pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	10 Tiang	Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)
		Ds. Babual Baboti Kec. Kotawaringin Lama	Jumlah Pengadaan / pemasangan lampu PJU (menggunakan lampu hemat energi LED)	10 Tiang	Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)
		Ds. Palih Baru Kec. Kotawaringin Lama	Jumlah Pengadaan / pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	20 Tiang	Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)
		Ds. Simpang Berambai Kec. Pangkalan Banteng	Pengadaan dan pemasangan Lampu Penerang Jalan Umum Jalan Pariwisata	20 Titik / lampu	Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)
		Ds. Sungai Bakau Kec. Kumai	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU	10 Titik / lampu	Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)
		Ds. Keraya Kec. Kumai	Jumlah Pengadaan / Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Patih Mambang	10 Titik / lampu	Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)

		Ds. Natai Raya Kec. Arsel	Jumlah Pengadaan dan pemasangan lampu PJU	5 Titik / lampu	Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)
--	--	------------------------------	---	--------------------	---

BAB III

TUJUAN, SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *topdown*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020), “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen.

Berdasarkan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, 5 prioritas nasional yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup

5. Stabilitas pertahanan dan keamanan

Guna menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan dokumen perencanaan kerja tahunan berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Sesuai tugas pokok Sekretariat Daerah, dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, maka arah kebijakan pembangunan daerah mengacu pada :

1. Bidang Pemerintahan Umum :

- Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
- Peningkatan peran parpol dan ormas serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
- Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan penanganan konflik

2. Bidang Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan tahun 2020 antara lain memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Reviu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pembentukan produk hukum daerah yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus. Guna mewujudkan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang responsif, akomodatif dan akuntabel, agar dapat

memberi dampak positif terhadap kemudahan investasi, proses birokrasi yang sederhana, serta pelayanan secara cepat, murah dan lebih baik;

- Evaluasi Perangkat Daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mengetahui efektifitas tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah, penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah, dan evaluasi jabatan perangkat daerah; dan
- Penyusunan dan evaluasi mandiri terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Pemerintah Provinsi, serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka pengelolaan energi dan sumber daya mineral, maka perumusan kegiatan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Optimalisasi perencanaan, penganggaran terkait pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru Terbaharukan (EBT)

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan pelaksanaan teknis dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebagai bentuk perwujudan visi dan misi dimaksud, maka perlu ditetapkan tujuan Sekretariat Daerah yang ditempuh melalui penetapan

beberapa sasaran yang saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja;
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;
3. Meningkatkan tata kelola pelayanan yang berkualitas berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik;
6. Meningkatkan Pengendalian perekonomian dan SDA;
7. Meningkatkan pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan.

B. Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
3. Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional;
4. Meningkatnya informasi dan kualitas layanan pengadaan secara elektronik;
5. Meningkatnya kapasitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
6. Meningkatnya pelayanan publik terhadap dokumentasi dan informasi hukum di Kab. Ktw. Barat;
7. Terpublikasikannya dan terdokumentasikannya kegiatan Pemerintah Daerah dengan baik;
8. Meningkatnya kualitas layanan publik kabupaten;
9. Terselenggaranya pemerintahan desa yang baik;
10. Persentase hasil monev bid perekonomian & SDA yang ditindaklanjuti;
11. Meningkatnya pelayanan di bidang keagamaan dan kemasyarakatan.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Sekretariat Daerah guna mencapai sasaran, dan dengan adanya program dan kegiatan ini diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebanyak 16 (enam belas) program dan 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
- Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah
- Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
- Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
- Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
- Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi KDH/WKDH dengan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan
- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
- Kegiatan Pengadaan Meubelair
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
- Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
- Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Asrama
- Kegiatan Penyediaan jasa sewa asrama mahasiswa
- Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung asrama

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

- Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- Kegiatan Penyelesaian konflik pertanahan

7. Program Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
 - Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Peningkatan Manajemen bidang Administrasi Pembangunan
 - Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
8. Program peningkatan infrastruktur, pengendalian energi dan Sumber Daya Alam
- Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Tenaga Listrik
 - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Sumber Daya Alam
9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum
- Kegiatan Kajian Peraturan Per-UU Daerah terhadap Per-UU yang Baru, lebih tinggi dan keserasian antara per-UU Daerah
 - Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan
 - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum
 - Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
10. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Kegiatan Peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang/jasa
 - Kegiatan Penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa
 - Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
11. Program penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi publik
- Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Peliputan dan publikasi Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Dialog/ Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
 - Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

- Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah
 - Kegiatan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
12. Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 - Kegiatan Penyiapan data dan informasi pembentukan, penataan dan pengembangan wilayah
 - Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbatasan antar daerah
 - Kegiatan Kerjasama antar Daerah/ Pihak Ketiga
13. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan
- Kegiatan Pelayanan, pembinaan dan peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan
 - Kegiatan Penyusunan bahan Kebijakan dan peningkatan kesadaran Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
 - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kemasyarakatan
14. Program Pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah
- Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi bidang pengembangan ekonomi dan potensi daerah
 - Kegiatan Pengendalian dan pemantauan sarana perekonomian
15. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah
- Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah
16. Program Pembinaan dan pengembangan organisasi
- Kegiatan Penyusunan, Penataan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Peningkatan dan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah

Adapun matriks rumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 dengan dana indikatif sebesar Rp.42.265.283.000,- (Empat Puluh Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) akan disajikan sebagaimana Tabel T-VI.C.33 sebagai berikut:

Tabel T-VI.C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(8)	(9)	(10)
0 0 0 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		98%	13.780.304.200			99%	15.251.222.000
4 1 3 10 0 0 0 1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat/ paket yang tersampaikan	Sekretariat Daerah	147 Pucuk, 150 kg paket	6.046.500	APBD	P3	200 Pucuk, 175kg paket	6.750.000
4 1 3 10 0 0 0 2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	Setda, ex Rujab Bupati, Rujab Wabup, Rujab Sekda, Rumah dinas dan PJU	12 bulan	5.399.937.200	APBD	P3	12 bulan	5.850.000.000
4 1 3 10 0 0 0 3	Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah	1 Tahun	404.750.000	APBD	P3	1 Tahun	445.225.000

				kantor								
40	10	30	104	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/ Anggota DPR	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Sekretariat Daerah	6 orang (1 org KDH, 1 org WKDH, 4 org ASN)	128.000.000	APBD	P3	12 OK	202.500.000
40	10	30	105	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah	Jumlah gedung/ barang milik daerah yang diasuransikan	Sekretariat Daerah	6 gedung dan 5 unit kendaraan	86.520.000	APBD	P3	5 gedung dan 5 unit kendaraan	95.172.000
40	10	30	106	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Sekretariat Daerah	70 unit	54.650.000	APBD	P3	90 unit	61.575.000
40	10	30	107	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Sekretariat Daerah, Rumah Jabatan, Kantor UKK Imigrasi	12 bulan	2.666.893.500	APBD	P3	12 bulan	2.900.000.000

4 0	1 0	3 0	10 8	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat Daerah, Rumah Jabatan, Kantor UKK Imigrasi, Taman PKK	12 bulan	891.402.000	APBD	P3	12 bulan	970.000.000
4 0	1 0	3 0	10 9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Sekretariat Daerah	127 unit/ tahun	127.050.000	APBD	P3	170 unit/ tahun	150.000.000
4 0	1 0	3 0	11 0	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan (untuk keperluan Setda dan Pokja PBJ)	Sekretariat Daerah	53 jenis	185.000.000	APBD	P3	40 jenis	200.000.000
4 0	1 0	3 0	11 1	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah persediaan barang cetakan	Sekretariat Daerah	13 jenis barang cetakan	150.005.000	APBD	P3	20 jenis	180.000.000
					- Jumlah Penggandaan	Sekretariat Daerah	250.116 lembar		APBD	P3	326.000 lembar	
4 0	1 0	3 0	11 2	Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen dan instalasi listrik yang disediakan	Sekretariat Daerah	39 jenis/ komponen	73.010.000	APBD	P3	35 jenis/ komponen	85.000.000
4 0	1 0	3 0	11 3	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Sekretariat Daerah	15 jenis	459.250.000	APBD	P3	20 jenis	505.000.000

4 0	1 0	3 0	11 4	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Sekretariat Daerah	7 jenis	35.000.000	APBD	P3	7 jenis	50.000.000
4 0	1 0	3 0	11 7	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan minuman, rapat, dan tamu kerja yang disediakan	Sekretariat Daerah	12 bulan	1.329.840.000	APBD	P3	12 bulan	1.400.000.000
4 0	1 0	3 0	11 8	Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat Daerah	288 OK	1.107.950.000	APBD	P3	300 OK	1.300.000.000
4 0	1 0	3 0	11 9	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi KDH/WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Lainnya	Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang dilaksanakan oleh KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah	45 OK	675.000.000	APBD	P3	55 OK	850.000.000
0	0	0	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		93%	12.013.849.800			94%	18.240.100.000

4 0	1 0	3 0	20 1	Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dibangun/ Jumlah bangunan penunjang di lokasi Rumah Jabatan Bupati yang dibangun	Kec. Arsel	4 unit	3.657.530.000	APBD	P3	4 unit	8.000.000.000
4 0	1 0	3 0	20 3	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kec. Arsel	2 unit, 3 lokasi/ titik	4.860.025.000	APBD	P3	1	5.000.000.000
4 0	1 0	3 0	20 5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	Sekretariat Daerah	3 unit	111.000.000	APBD	P3	2 unit	1.114.000.000
4 0	1 0	3 0	20 7	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang diadakan	Sekretariat Daerah	9 jenis perlengkapan gedung	148.550.800	APBD	P3	10 jenis	355.300.000
4 0	1 0	3 0	20 9	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Sekretariat Daerah	5 jenis	136.250.000	APBD	P3	10 jenis	400.000.000
4 0	1 0	3 0	21 0	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan	Sekretariat Daerah, Gedung LPTQ (Kec. Arut Selatan)	15 jenis	312.600.000	APBD	P3	15 jenis	350.000.000

4 0	1 0	3 0	21 1	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Kecamatan Arsel	2 unit	113.500.000	APBD	P3	2 unit	130.000.000
4 0	1 0	3 0	21 3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Sekretariat Daerah	1 unit	303.947.000	APBD	P3	2 unit	425.000.000
4 0	1 0	3 0	21 4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	Sekretariat Daerah	4 unit	206.400.000	APBD	P3	4 unit	300.000.000
4 0	1 0	3 0	21 5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara rutin/berkala	Sekretariat Daerah	50 unit	500.600.000	APBD	P3	50 unit	550.000.000
4 0	1 0	3 0	21 7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Sekretariat Daerah	70 unit	28.000.000	APBD	P3	70 unit	30.800.000
4 0	1 0	3 0	21 9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Sekretariat Daerah	102 unit	84.500.000	APBD	P3	110 unit	125.000.000
4 0	1 0	3 0	22 1	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat	Jumlah rumah jabatan yang direhab	Kecamatan Arsel	2 unit	231.000.000	APBD	P3	3 unit	360.000.000

				rumah jabatan								
4 0	1 0	3 0	22 3	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Sekretariat Daerah	3 unit	535.000.000	APBD	P3	3 unit	600.000.000
4 0	1 0	3 0	22 6	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Asrama	Jumlah perlengkapan gedung asrama yang diadakan	Palangkaraya	3 jenis	30.000.000	APBD	P3	-	-
4 0	1 0	3 0	22 7	Kegiatan Penyediaan Jasa Asrama Mahasiswa	Jumlah asrama mahasiswa yang disewa	Semarang, Surabaya, Malang, Banjarmasin, Banjar Baru, Yogyakarta, Solo	7 unit	405.000.000	APBD	P3	7 asrama	500.000.000
4 0	1 0	3 0	22 8	Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung asrama	Jumlah asrama mahasiswa yang direhab	Palangkaraya	2 unit	349.947.000	APBD	P3		
0	0	0	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur		92%	357.500.000			93%	370.000.000
4 0	1 0	3 0	30 2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Sekretariat Daerah	210 stell; 200 atribut	177.500.000	APBD	P3	404 stell	275.000.000

4 0	1 0	3 0	30 5	Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Sekretariat Daerah	228 stell	180.000.000	APBD	P3	28 stell	75.000.000
0	0	0	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		26%	319.500.000			27%	400.000.000
4 0	1 0	3 0	50 3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek dan pelatihan	Sekretariat Daerah	37 OK	319.500.000	APBD	P3	45 OK	400.000.000
0	0	0	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	63.000.000			100%	65.000.000
4 0	1 0	3 0	60 2	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Sekretariat Daerah	2 dokumen	3.000.000	APBD	P3	2 dokumen	5.000.000
4 0	1 0	3 0	60 4	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Sekretariat Daerah	2 dokumen	60.000.000	APBD	P3	2 dokumen	60.000.000

2 0 4 15	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan		45%	89.650.000			50%	100.000.000
	Kegiatan Penyelesaian konflik Pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang dapat terselesaikan	Sekretariat Daerah	3 permasalahan	89.650.000	APBD	P4	3 permasalahan	100.000.000
4 0 1 15	Program Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan	Jumlah sistem informasi bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang yang diterapkan dalam mendukung E-gov		2 sistem informasi	580.693.923		P4	2 sistem informasi	628.000.000
		Persentase data dan informasi bidang perencanaan, pengendalian, monev dan administrasi pembangunan yang dapat dimanfaatkan		100%				100%	

4 0	1 0	3 1	50 1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara elektronik			190.706.565	APBD	P4	202.000.000
		1. Sub.keg. Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara elektronik	- Jumlah data perusahaan yang diverifikasi/ mendapatkan fasilitasi/agregasi & laporan pengaduan permasalahan LPSE serta data SKPD/ PPK/ Paniti/ Pjbt pengadaan yang memperoleh akun SPSE	Sekretariat Daerah, Prov. Kalteng, Jakarta, Pemda lainnya	36 data	97.747.450	APBD		36 data	100.000.000
			- Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek LPSE		145 orang				145 orang	

	2. Sub.keg. Bimtek/ Asistensi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	- Jumlah peserta asistensi SiRUP (APBD murni dan Perubahan)	Sekretariat Daerah	254 orang	76.559.450	APBD		254 orang	84.000.000
	3. Sub.keg. Rapat Koordinasi Evaluasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	- Jumlah SKPD yang dievaluasi Rencana Umum Pengadaannya	Sekretariat Daerah	38 SKPD	16.399.665	APBD		38 SKPD	18.000.000
4 1 3 0 0 1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah rancangan dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran Setda yang dihasilkan	Sekretariat Daerah	25 dokumen	47.012.373	APBD	P4	25 dokumen	50.000.000
4 1 3 50 0 0 1 3	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan TEPRA	Sekretariat Daerah	12 laporan	229.174.310	APBD	P4	12 laporan	251.000.000
	1. Sub.keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan Monev pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kotawaringin Barat	2 laporan	45.910.800	APBD	P4	2 laporan	50.000.000

	2. Sub.keg. Asistensi Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan	Jumlah peserta kegiatan asistensi pengisian RFK dan progres PBJ serta rencana aksi percepatan penyerapan anggaran	Pangkalan Bun	45 orang	44.777.450	APBD	P4	45 orang	49.000.000
	3. Sub.keg. Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan	Jumlah laporan TEPRAB Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalteng	12 laporan	138.486.060	APBD	P4	12 laporan	152.000.000
4 1 3 50 0 0 1 4	kegiatan Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan				113.800.675		P4		125.000.000
	1. Sub.keg. Pengelolaan dan Pelaporan Database Dukungan Kebijakan Nasional	- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan asistensi SDDKN	Kab. Ktw. Barat	100 orang	73.910.950	APBD	P4	100 orang	81.000.000
		- Jumlah laporan/ data SDDKN yang disusun		2 dokumen				2 dokumen	

	2. Sub.keg. Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah informasi pembangunan yang dikelola melalui Website	Sekretariat Daerah, Prov. Kalteng, Jakarta, Pemda lainnya	1 web	39.889.725	APBD	P4	1 web	44.000.000
3 0 5 15	Program Peningkatan Infrastruktur, Pengendalian energi dan Sumber Daya Alam	Persentase laporan pengendalian bidang infrastruktur ketenagalistrikan dan Sumber Daya Alam yang dihasilkan		100%	3.837.090.000			100%	3.065.500.000
4 1 3 0 0 1	Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan infrastruktur tenaga listrik	Jumlah pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU di 6 kecamatan Kab. Kobar	Kab. Ktw. Barat	359 unit/ tiang	2.640.000.000	APBD	P6	359 unit/ tiang	3.000.000.000
				85 Titik/tiang	1.137.500.000	APBD - Pagu Indikatif Kecamatan	P1		
4 1 3 50 0 0 1 2	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber daya				59.590.000	APBD	P4		65.500.000

	Alam								
	1. Sub.keg. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber daya Alam	Jumlah dan jenis potensi sumber daya alam yang di monev	Kab. Ktw. Barat	2 jenis	21.712.500	APBD	P4	2 jenis	24.000.000
	2. Sub.keg. Evaluasi dan Sinkronisasi dan Konsultasi Pengelolaan Sumber Daya Alam	Jumlah dan jenis potensi sumber daya alam yang di evaluasi dan sinkronisasikan	Kab. Ktw. Barat, Prov. Kalteng, Prov. Lainnya	2 jenis	37.877.500	APBD	P4	2 jenis	41.500.000
4 0 1 16	Program Penataan Peraturan Perundangan-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi hukum	Persentase produk hukum yang dapat diakses masyarakat		100%	792.160.300			100%	852.999.900
		Persentase permasalahan hukum yang tertangani		100%				100%	
4 1 3 60 0 0 1 1	Kegiatan Kajian Peraturan Per-UU Daerah terhadap Per-UU yang Baru, lebih tinggi dan	Jumlah Perda/Perbup ditetapkan	Sekretariat Daerah	30 Perda/Perbup	166.999.900	APBD	P4	30 Perda/Perbup	166.999.900

					keserasian antara per-UU Daerah														
4 0	1 0	3 1	60 2		Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Lembaran Daerah dan Berita Daerah diterbitkan	6 kec (Arsel, Kumai, Aruta, P.Lada, P. Banteng, Ktw. Lama)	30 Lemda	77.673.830	APBD	P4	30 Lemda	85.500.000						
						- Jumlah Himpunan Perda yang disebarluaskan		50 Buku					50 Buku						
						- Jumlah Produk Hukum yang dapat diakses masyarakat		30 Perda/ Perbup					30 Perda/ Perbup						
4 0	1 0	3 1	60 3		Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Desa/ kelurahan tersosialisasi	6 kec (Arsel, Kumai, Aruta, P.Lada, P. Banteng, Ktw. Lama)	10 Desa	187.326.170	APBD	P4	10 Desa	206.000.000						
						- Jumlah Kelompok Kadarkum dan Desa Binaan Sadar Hukum		10 Kelompok dan Desa					10 Kelompok dan Desa						
4 0	1 0	3 1	60 4		Kegiatan Pemberian bantuan Hukum	- Jumlah Rapat-Rapat Permasalahan Hukum oleh Tim Khusus	Pangkalan Bun	12 kali	308.660.400	APBD	P4	12 kali	340.000.000						
						- Jumlah Dokumen Administrasi Beracara di Pengadilan		3 dokumen				3 dokumen							

		- Jumlah Bantuan hukum yang diberikan kepada Pemerintah Kab.Ktw. Barat		2 Permasalahan Hukum				2 Permasalahan Hukum	
4 1 3 60 0 0 1 5	Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)				51.500.000	APBD	P4		54.500.000
	1. Sub.keg. Diseminasi/ Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah peserta Diseminasi/ Sosialisasi Hak Asasi Manusia	Kab. Kotawaringin Barat	50 orang	23.610.100	APBD	P4	50 orang	24.000.000
	2. Sub.Keg. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Panitia RANHAM dan Pokja	Pangkalan Bun	3 kali	27.889.900	APBD	P4	3 kali	30.500.000
4 0 1 17	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui ULP		100%	834.990.700			100%	901.276.400

4 0	1 0	3 1	70 1	Kegiatan Peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang/jasa				639.999.900	APBD	P4		700.000.000
				1. Sub.keg. Peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang/jasa	- Jumlah laporan pengadaan barang/ jasa melalui ULP	Kab. Kobar, Prov. Kalteng, Pusat	60 buku	502.524.950	APBD	P4	60 buku	550.000.000
				2. Sub.keg. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah peserta Bimtek pengadaan barang dan jasa	Pangkalan Bun	150	137.474.950	APBD	P4	150	150.000.000
4 0	1 0	3 1	70 2	Kegiatan Penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa	Jumlah penyelesaian kasus/permasalahan an pengadaan barang/jasa (pengaduan, sanggahan dan konsultasi)	Kab. Ktw. Barat, Prov. Pusat, Pem.kab lainnya	8 kasus	133.776.400	APBD	P4	8 kasus	133.776.400
4 0	1 0	3 1	70 3	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	- Monitoring evaluasi PBJ Desa di Kecamatan dan Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kab. Kobar	Kab. Kotawaringin Barat	6 kegiatan	61.214.400	APBD	P4	6 kegiatan	67.500.000

		- Jumlah laporan evaluasi pengadaan barang/ jasa Kabupaten Kotawaringin Barat		12 laporan				12 laporan	
4 0 1 18	Program Penyelenggaraan dan Keprotokolan dan Komunikasi Publik	Persentase publikasi dan dokumentasi pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah		85%	1.897.700.000			85%	2.208.250.000
		Persentase pelayanan kedinasan KDH / WKDH yang terlaksana dengan baik		90%				90%	
4 1 3 80 0 0 1 1	Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Pemerintah daerah	- Jumlah dokumentasi Naskah Sambutan/ Pidato Bupati	Kab. Ktw. Barat	200 buku	57.500.000	APBD	P4	200 buku	63.250.000
		- Jumlah dokumentasi data dan informasi dari media dalam bentuk kliping		356 exp				356 exp	

4 0	1 0	3 1	80 2	Kegiatan Peliputan dan Publikasi Pemerintah daerah	- Jumlah Peliputan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan dan luar daerah	Kab. Kotawaringin Barat, pemda lainnya	17 kali	350.000.000	APBD	P4	17 kali	385.000.000
					- Jumlah kegiatan pameran pembangunan/ publikasi pemerintah daerah yang diikuti		1 kali				1 kali	
					- Jumlah dokumentasi dan publikasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk buletin, album, DVD, spanduk dan sejenisnya		9 jenis				9 jenis	
4 0	1 0	3 1	80 3	Kegiatan Dialog/ Audinsi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Jumlah dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Kab. Kotawaringin Barat	1 tahun	600.000.000	APBD	P4	1 tahun	700.000.000

4 0	1 0	3 1	80 4	Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri yang diterima	Kab. Kotawaringin Barat	30 kali	491.000.000	APBD	P4	30 kali	550.000.000
4 0	1 0	3 1	80 5	Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	Kab. Kotawaringin Barat	80 kali	303.500.000	APBD	P4	80 kali	400.000.000
4 0	1 0	3 1	80 6	Kegiatan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah jasa keprotokolan	Kab. Kotawaringin Barat, pemda lainnya	10 kali	95.700.000	APBD	P4	10 kali	110.000.000
4	0	1	19	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi Daerah	Jumlah Desa yang memiliki dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu		16 Desa	563.490.500			16 Desa	632.500.000
					Capaian kesepakatan tata batas wilayah		100%				100%	

		antar Kabupaten							
		Persentase data dan informasi pembentukan otonomi daerah baru		100%				100%	
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		100%				100%	
		Jumlah MoU yang disepakati		7 dokumen				9 dokumen	
4 0	1 0	3 1	90 1	Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Desa					
		1. Sub.keg. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Desa	Jumlah peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Kotawaringin Barat	200 orang	93.585.200	APBD	P4	200 orang
						149.990.000	APBD	P4	162.500.000
									100.000.000

	2. Sub.keg. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Waktu pemberian stimulan kepada Demang Kepala Adat (2 orang)	Kab. Kotawaringin Barat	12 bulan	36.000.000	APBD	P4	12 bulan	40.000.000
	3. Sub.keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan tata kelola pemerintahan desa	Jumlah Desa yang dimonev bidang penyelenggaraan pemdes	Kab. Kotawaringin Barat	16 desa	20.404.800	APBD	P4	16 desa	22.500.000
4 1 3 90 0 0 1 3	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan desa (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD yang dihasilkan	Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalteng, DKI Jakarta	1 LPPD	45.500.000	APBD	P4	1 LPPD	60.000.000
4 1 3 90 0 0 1 5	Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Pembentukan Penataan dan Pengembangan Wilayah				110.000.000	APBD	P4		125.000.000
	1. Sub.Keg. Penyiapan Data dan Informasi Pembentukan, Penataan dan Pengembangan	- Jumlah data kesiapan pemekaran kecamatan	Kab. Kotawaringin Barat	3 dokumen	92.996.000	APBD	P4	3 dokumen	105.000.000

	Wilayah											
		- Jumlah Ranperda pemekaran kecamatan dan kelurahan		2 Ranperda				2 Ranperda				
		- Jumlah Ranperbup pemekaran desa		1 Ranperbup				1 Ranperbup				
	2. Sub.Keb. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penataan dan Pengembangan Wilayah	- Jumlah laporan hasil monev penataan dan pengembangan wilayah	Kab. Kotawaringin Barat	10 dokumen	17.004.000	APBD	P4	10 dokumen	20.000.000			
40	10	31	906	Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Daerah	- Jumlah Perbup tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Kotawaringin Barat	5 RanPerbup	173.000.000	APBD	P4	5 RanPerbup	190.000.000
		- Jumlah Peta Batas		8 Peta				8 Peta				
		- Jumlah Pilar Batas Kabupaten		13 Pilar				13 Pilar				

4 0	1 0	3 1	90 7	Kegiatan Kerja sama antar Daerah/Pihak Ketiga	Jumlah Pengajuan/ Penawaran Kerjasama dengan Daerah Lain/ Pihak Ketiga		5 Dokumen	85.000.500	APBD	P4	5 Dokumen	95.000.000
4	0	1	20	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan	Persentase pelayanan dan fasilitasi di bidang keagamaan dan kemasyarakatan		90%	6.328.309.200			90%	7.070.000.000
4 0	1 0	3 2	00 1	Kegiatan Pelayanan, Pembinaan dan Peningkatan Pemahaman Nilai-nilai Keagamaan				6.119.264.000	APBD			6.840.000.000
				1. Sub.Keg.Peningkatan Pemahaman Nilai-nilai Keagamaan	- Jumlah desa di kecamatan yang dikunjungi dalam kegiatan Safari Ramadhan	Kab. Kobar	6 Desa	333.425.000	APBD	P4	6 Desa	375.000.000
					- Jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan (Kobar Bersholawat)		1 Kegiatan				1 Kegiatan	
				2. Sub.Keg. Pembinaan Tokoh-tokoh Keagamaan	- Jumlah Guru Mengaji yang mendapatkan pelatihan	Kab. Kobar	300 orang	22.950.000	APBD	P4	300 orang	30.000.000

	3. Sub.Keg. Pelayanan Ibadah Haji	Jumlah calon/ jemaah haji yang dapat terlayani	Kab. Kobar, Prov. Kalteng	160 orang	619.750.000	APBD	P4	160 orang	750.000.000
	4. Sub.Keg. Pembinaan, seleksi dan penyelenggaraan festival keagamaan	Jumlah kegiatan LPTQ/MTQ yang dilaksanakan	Kab. Kobar, Prov. Kalteng	3 kegiatan	3.475.739.000	APBD	P4	3 kegiatan	3.850.000.000
	5. Sub. Keg. Pemberdayaan Lembaga Penghulu	Jumlah penghulu Non PNS yang diberikan insentif	Kab. Kotawaringin Barat	24 orang	144.600.000	APBD	P6	24 orang	160.000.000
	6. Sub.Keg. Pemberdayaan Tokoh-tokoh Keagamaan	Jumlah Guru Ngaji yang diberikan insentif	Kab. Kotawaringin Barat	300 orang	1.522.800.000	APBD	P6	300 orang	1.675.000.000
		Jumlah tokoh agama non muslim yang diberikan insentif		123 orang				123 orang	
4 1 3 00 0 0 2 2	Kegiatan Penyusunan Bahan Kebijakan dan Peningkatan Kesadaran Di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	- Jumlah Laporan bahan kebijakan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial	Sekretariat Daerah	1 dokumen	163.134.400	APBD	P4	1 dokumen	180.000.000
	Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	- Jumlah penilaian Lomba Sekolah Sehat		24 sekolah				24 sekolah	
4 1 3 00 0 0 2 3	Kegiatan Monitoring,	- Jumlah laporan monev lembaga	Kab. Ktw. Barat	2 dokumen	45.910.800	APBD	P4	2 dokumen	50.000.000

		Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kemasyarakatan	kemasyarakatan						
			- Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan/ hibah	3 dokumen				3 dokumen	
4 0 1 21		Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah	Persentase laporan monev bid perekonomian yang dihasilkan	100%	120.139.377			100%	135.000.000
4 1 3 10 0 0 2 1		Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pengembangan Ekonomi dan Potensi Daerah	jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan ekonomi dan potensi daerah yang dilaksanakan	Kab. Ktw. Barat, Prov. Kalteng, dan Prov. Lainnya	2 dokumen	70.565.625	APBD	P4	2 dokumen 80.000.000
4 1 3 10 0 0 2 2		Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Sarana Perekonomian	Jumlah laporan pengawasan, penyaluran BBM dan LPG di 6 Kecamatan	6 kec (Arsel, Kumai, Aruta, P.Lada, P. Banteng, Ktw. Lama)	6 dokumen	49.573.752	APBD	P4	6 dokumen 55.000.000
		1. Sub.Keg Pengendalian Sarana Perekonomian	Jumah laporan pengendalian sarana perekonomian	6 kec (Arsel, Kumai, Aruta, P.Lada, P. Banteng, Ktw. Lama)	2 laporan	33.933.000	APBD		2 laporan 40.000.000

	2. Sub.Keg. Pemantauan/ Monitoring dan Pengawasan Penyaluran BBM dan LPG	Jumlah laporan pengawasan, penyaluran BBM dan LPG di 6 Kecamatan	6 kec (Arsel, Kumai, Aruta, P.Lada, P. Banteng, Ktw. Lama)	6 dokumen	15.640.752	APBD		6 dokumen	20.000.000
4 0 1 22	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Kinerja Pemerintah	Persentase SKPD yang nilai SAKIPnya baik (B) hasil evaluasi Inspektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi		75%	350.000.000			85%	386.000.000
4 1 3 20 0 0 2 1	Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah				350.000.000	APBD	P4		386.000.000
	1. Sub.keg. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LKIP RKT, PK, ANJAB & ABK Kabupaten Kotawaringin Barat yang tersusun	Sekretariat Daerah	4 dokumen	244.705.800	APBD	P4	4 dokumen	270.000.000
	2. Sub.keg. Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah peserta kegiatan asistensi LKJIP	Sekretariat Daerah	100 orang	73.910.950	APBD	P4	100 orang	81.000.000

	3. Sub.keg. Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	- Jumlah peserta kegiatan sosialisasi LHKPN	Sekretariat Daerah	100 orang	31.383.250	APBD	P4	100 orang	35.000.000
		- Jumlah Pejabat/ASN yang melapor LHKPN	Kab. Kotawaringin Barat	292 orang				292 orang	
4 0 1 22	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Persentase SKPD yang memiliki SP dan SOP bidang administrasi dan pemerintahan		100%	336.905.000			100%	372.000.000
4 1 3 30 0 0 2 1	Kegiatan Penyusunan, Penataan Evaluasi Ketatalaksanaan Perangkat daerah	Jumlah peserta sosialisasi SOP dan Pelayanan Publik		100 orang	100.000.000	APBD	P4	100 orang	110.000.000
	1. Sub.keg. Penyusunan, Penataan Evaluasi Ketatalaksanaan Perangkat daerah	- Jumlah laporan hasil survey IKM SKPD	Kab. Ktw. Barat, Prov, Pusat	7 laporan/ SKPD	68.616.750	APBD		7 laporan/ SKPD	75.500.000
		- Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai SOP bidang administrasi dan pelayanan		16 SKPD				16 SKPD	

		2. Sub.keg. Sosialisasi Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Jumlah peserta Sosialisasi Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Pangkalan Bun	100 orang	31.383.250	APBD		100 orang	34.500.000
4 1 3 30 0 0 2 2		Kegiatan Peningkatan dan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah				236.905.000	APBD	P4		262.000.000
		1. Sub.keg. Peningkatan dan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	- Jumlah profil kelembagaan yang dihasilkan	Kab. Ktw. Barat, Prov, DKI Jkt, Pemda lainnya	1 dokumen	198.646.000	APBD	P4	1 dokumen	220.000.000
			- Jumlah Ranperda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dihasilkan		1 Ranperda				1 Ranperda	
			- Jumlah dokumen SPM yang dibuat		3 dokumen				3 dokumen	
			- Jumlah kelembagaan yang dikelola		38 SKPD				38 SKPD	
			- Jumlah pembinaan dan pengembangan organisasi		38 SKPD				38 SKPD	

	2. Sub.keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kelembagaan	- Jumlah laporan monev kelembagaan	Kab. Ktw. Barat	6 laporan	38.259.000	APBD	P4	6 laporan	42.000.000
Total					42.265.283.000				50.677.848.300

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 disusun sebagai bahan penelaahan dalam rangka penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2020.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini belum lengkap dan sempurna, oleh karena itu mohon kritik dan saran demi perbaikan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini. Harapan kami semoga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Pangkalan Bun, Juli 2019
Sekretaris Daerah
Kab. Kotawaringin Barat,



SUYANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 199203 1 009